

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan strategi pembangunan ekonomi yang tidak membutuhkan banyak investasi modal di negara-negara seperti Indonesia yang memiliki daya tarik wisata yang tinggi. Indonesia memiliki keunggulan strategis karena kekayaan alam dan budayanya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik lebih banyak wisatawan dari sektor pariwisata terutama wisatawan dari negara—negara kaya. Industri pariwisata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat, khususnya terhadap masyarakat yang berada di sekitar tempat wisata. Karena potensinya yang sangat besar, sektor pariwisata merupakan mesin utama kemakmuran ekonomi, dan perencanaan pembangunan pemerintah sangat menekan pertumbuhannya. Selain itu, pariwisata dinilai mempunyai peran krusial dalam pertumbuhan Indonesia, terutama sebagai sumber pendapatan negara. Selain menjadi pendongkrak perekonomian, pariwisata dinilai mampu menurunkan angka pengangguran. Salah satu sektor perekonomian nasional yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara melalui perolehan devisa negara dari setktor pariwisata (Aliansyah & Hermawan, 2020). Data berikut menyajikan statistik kunjungan turis internasional dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan devisa negara.

**Tabel 1. 1
Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia**

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Juta)
2019	16,11
2020	4,05

2021	1,56
2022	5,89
2023	11,68

Sumber: BPS RI &Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, (2024)

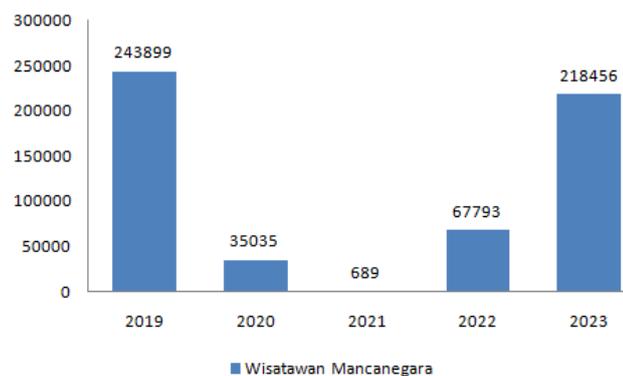
Jika dilihat dari tabel tersebut, Indonesia menerima 16,11 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami penurunan tajam pada 2020 menjadi 4,05 juta dan terus turun hingga hanya 1,56 juta kunjungan pada tahun 2021.

Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya tingkat kunjungan wisatawan internasional adalah ketidak rataan perjalanan wisata oleh wisatawan di setiap daerah. Ketidak rataan kunjungan wisatawan disebabkan oleh pembangunan wisata yang tidak merata juga, dimana ketidak rataan pembangunan wisata di setiap daerah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya letaknya yang jauh dari ibu kota, daerah yang belum memiliki infrastruktur jalan yang memadai, dan aksesibilitas yang sulit. Akibat letaknya yang jauh serta aksesibilitas yang sulit menjadikan daerah berpotensi wisata tidak dikunjungi oleh wisatawan (Asmara, 2020). Peran daerah sangat penting dalam mengatasi pembangunan wisata yang tidak merata, maka dari itu pemerintah daerah diberi kebebasan dan tanggung jawab untuk mengurus urusan pembangunan di wilayahnya tanpa tergantung pada pemerintah pusat.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah proses pemberian wewenang, hak istimewa, dan kewajiban yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahan dan melayani hak atau aspirasi masyarakat. Dengan sistem

desentralisasi yang diterapkan, pemerintah daerah dapat mengenali dan memanfaatkan potensi daerahnya, terutama di bidang industri seperti pariwisata.

Provinsi Jawa Timur dikenal memiliki beragam potensi pariwisata yang signifikan. Dengan 747 lokasi wisata di provinsi ini yang mencakup daya tarik budaya, alam. Religi serta destinasi wisata buatan. Salah satu dari sepuluh tempat wisata terbaik di Indonesia adalah objek wisata di kawasan Bromo Tengger Semeru. Selain itu, Jawa Timur juga memiliki tempat wisata populer seperti Kawah Ijen di Kabupaten Bondowoso, Gunung Kelud di Kabupaten Kediri, dan Pantai Prigi di Kabupaten Trenggalek (detik.com, 2022). Banyaknya destinasi wisata yang berada di Jawa Timur tidak hanya memikat perhatian turis dalam negeri saja, namun turis internasional juga tertarik untuk melakukan kunjungan ke beberapa lokasi wisata yang berada di Jawa Timur. Berikut merupakan rekapitulasi kunjungan wisatawan internasional ke Provinsi Jawa Timur selama periode 2019 sampai 2023.



Gambar 1. 1
Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Jawa Timur Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (2024)

Dilihat dari gambar diatas, terdapat 243,899 kunjungan wisatawan internasional ke Jawa Timur pada tahun 2019. Meskipun demikian, terjadi penurunan yang sangat tajam terhadap minat berkunjung wisatawan mancanegara pada tahun 2020-2021. Dalam menyikapi hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa timur

secara konsisten melakukan upaya untuk mengajak seluruh pemangku kebijakan dari setiap kota/kabupaten untuk bekerjasama dan menguatkan infrastruktur (Rosanjaya, 2023). Sebagaimana termuat dalam (news.detik.com, 2020):

news.detik.com- “Kita semua harus punya tekad dan komitmen yang kuat untuk memajukan sektor pariwisata sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Pertama harus ada komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan di kabupaten/kota untuk mengembangkan sektor wisata di daerahnya. Kedua, koordinasi stakeholder strategis agar terjadi sinergi yang kuat. Ketiga, butuh investasi khususnya dalam menyiapkan infrastruktur yang bisa memberikan layanan yang lebih baik, aman, dan menyenangkan bagi seluruh wisatawan” tegas Gubernur Khofifah saat membuka *East Java Culture and Torism Award 2020*, di Surabaya.

Sumber: (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4813393/khofifah-ajak-kepala-daerah-tingkatkan-sektor-pariwisata-ini-tujuannya> diakses pada tanggal 9 September 2024)

Satu diantara jenis wisata yang pada periode ini banyak di kunjungi adalah

wisata religi. Terdapat beberapa provinsi yang memiliki destinasi wisata religi, akan tetapi destinasi wisata religi paling banyak berada di Jawa Timur.

Tabel 1. 2
Jumlah Wisatawan Pada Wisata Religi di Jawa Timur

No	Wisata Religi	Tahun	
		2021	2022
1.	Makam Sunan Bonang	1.247.936	2.296.033
2.	Makam Ibrahim Asmoro	1.241.230	2.108.910
3.	Makam Gus Dur	186.130	1.296.493
4.	Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel	-	1.412.749
5.	Makam Sunan Giri	-	1.325.427
6.	Makam M.M Ibrahim	-	1.108.840

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2024)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, Makam Sunan Bonang menempati urutan pertama dengan tingkat kunjungan tertinggi wisata religi di Jawa Timur. Selanjutnya disusul oleh Makam Ibrahim Asmoro. Dari 6 wisata religi yang ada, Makam Gus Dur tergolong sebagai destinasi wisata religi yang paling baru dibandingkan dengan lainnya. Selain itu, kelima lokasi wisata keagamaan tersebut

merupakan seorang sunan, sedangkan Gus Dur merupakan seorang ulama serta negarawan.

Kabupaten Jombang adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang menawarkan berbagai nilai strategis dan keunikan di sektor pariwisata. Kabupaten Jombang telah menerima berbagai penghargaan pada bidang pariwisata, diantaranya pada tahun 2018 menerima penghargaan Anugerah Wisata Jawa Timur yang mengusung tema “Melalui Anugerah Wisata Jawa Timur Kita Kembangkan Daya Tarik Wisata Yang Berwawasan Lingkungan Itu”. Menurut Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan dedikasi dan perhatian yang kuat dalam upaya pengembangan sektor wisata daerah (jombangkab.go.id, 2020). Selanjutnya ditahun 2021, Kabupaten Jombang kembali menerima penghargaan Desa Wisata dari Gubernur Jawa Timur sebagai Penyaji Terbaik Virtual Tour Desa Wisata, East Java Award (faktualnews.co, 2021). Tidak cukup hingga itu, Pemerintah Kabupaten Jombang ditahun 2023 kembali menerima penghargaan atas capaian budaya serta pariwisata Jawa Timur pada ajang East Java Tourism Award (jombang.times.co.id, 2023).

Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan PERDA Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041. Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan strategi pengembangan kawasan pariwisata, meliputi: 1) Peningkatan potensi wisata alam, budaya, dan buatan , 2) Penetapan destinasi wisata unggulan, 3) Penetapan rute pengembangan pariwisata terpadu yang selaras dengan perencanaan infrastruktur wilayah, 4) Pelestarian tradisi dan kearifan lokal, 5) Penguatan dukungan

masyarakat dan pelaku usaha melalui program bimbingan, pendidikan, dan pelatihan untuk mendorong pembangunan pariwisata (website.jombangkab.go.id, 2023).

Menurut PERDA Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata, Kepariwisataan diartikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multi disiplin yang timbul dari kebutuhan setiap individu dan daerah serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan investor lokal. Sifat pariwisata yang multidimensi membuat keterlibatan masyarakat dalam industri ini menjadi penting. Hal ini didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021 pasal 66 yang mengatur tentang peran masyarakat dan bagaimana hal tersebut dapat membantu pengembangan pariwisata. Lebih jauh lagi, dengan memberdayakan masyarakat lokal dan memberi mereka akses ke pekerjaan di sektor pariwisata, Undang-Undang Daerah ini menekankan betapa pentingnya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Gus Dur yang bernama asli KH. Abdurrahman Wahid, yang pernah menduduki jabatan sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur dimakamkan di Pesantren Tebuireng, Jombang pada 30 Desember 2009. Sebelum Gus Dur menghembuskan nafas terakhir dan disemayamkan di Pesantren Tebuireng, kompleks tersebut telah menjadi tempat peristirahatan terakhir dua tokoh pahlawan nasional, yaitu KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdul Wahid Hasyim. Sebelum meninggalnya Gus Dur, banyak orang yang mendatangi makam tersebut,

kemudian setelah wafatnya Gus Dur, pengunjung makam semakin bertambah (daerah.sindonews.com, 2021). Seiring dengan berjalannya waktu, Makam Gus Dur dioptimalkan dan dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang yang menjadi objek wisata keagamaan. Hasil dari pengembangan Makam Gus Dur diantaranya ialah, Makam Gus Dur menempati posisi ketiga dengan jumlah wisatawan paling tinggi di Jawa Timur pada tahun 2021-2022, tidak hanya sampai disitu parkir Makam Gus Dur yang awalnya berada dipinggir jalan raya, saat ini telah berpindah karena telah didirikannya parkir khusus untuk wisatawan yang hendak berkunjung. Berikut jumlah kunjungan wisatawan Makam Gus Dur:

Tabel 1. 3
Tingkat Kunjungan Wisata Religi Makam Gus Dur

Tahun	Bulan	Jumlah Kunjungan
2021	Jan – Des	186.130
2022	Jan – Des	1.296.493
2023	Jan - Des	1.322.644

Sumber: UPT Makam Gus Dur (2024)

Terlihat dari tabel diatas, kunjungan ke Makam Gus Dur pada tahun 2021 hanya sebanyak 186.130 kunjungan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan karantina wilayah yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai tindakan pencegahan terhadap penyebaran virus Covid-19, sehingga banyak tempat wisata di Kabupaten Jombang yang tutup. Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan mulai bangkit lagi dan bertambah sebesar 1.296.493 kunjungan. Pemerintah Kabupaten Jombang dan pihak-pihak terkait terus berupaya untuk melestarikan dan menata kembali Wisata Religi Makam Gus Dur pada tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2023 terdapat peningkatan dibanding tahun

sebelumnya, yaitu sebesar 1.322.644 kunjungan. Keunikan Makam Gus Dur yang dapat menarik wisatawan menjadi alasan meningkatnya jumlah pengunjung.

Peningkatan jumlah kunjungan ke Makam Gus Dur dari tahun ke tahun juga diimbangi oleh pengembangan Makam Gus Dur. Haul Gus Dur merupakan acara rutin tahunan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh lintas agama serta sejumlah negarawan. Acara rutin tahunan tersebut berlangsung selama dua hari dan terdapat beberapa kegiatan berbeda disetiap tahunnya. Pada tahun 2021-2023 terdapat program-program baru yang dihadirkan dalam acara Haul Gus Dur, program tersebut diantaranya ialah nonton bersama, diskusi film, konvoi bersama komunitas vespa, bazar, acara musik, barongsai serta stand up comedy. Acara tersebut merupakan salah satu yang menjadi daya tarik wisatawan untuk melakukan kunjungan ke Makam Gus Dur.

Di sekitar wisata religi Makam Gus Dur ini teridentifikasi keikutsertaan masyarakat lokal, yakni melalui pemberdayaan pengadaan barang dan jasa akan kebutuhan wisatawan. Terdapat penginapan yang berada tepat di sebelah timur Makam Gus Dur, selain itu terdapat warung-warung yang menyediakan makanan siap saji. Selain itu, saat wisatawan berjalan dari parkiranan Kawasan Makam Gus Dur menuju pintu masuk akan disuguhkan dengan stand pedagang yang ada disepanjang rute, mereka menjual berbagai barang, mulai dari baju, sarung, peci, aksesoris, dan makanan. Dalam hal ini, terlihat bahwa masyarakat lokal dijadikan mitra yang setara dalam upaya meningkatkan potensi daerah, selain diberdayakan untuk meningkatkan laju perekonomiannya (Irmadella, 2021). Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat berkontribusi atas perkembangan Wisata Religi

Makam Gus Dur, sebagai upaya untuk memperkuat kesejahteraan serta mutu hidup masyarakat setempat.

Berdasarkan wawancara pra-penelitian yang dilakukan peneliti, sebelum adanya pengembangan melalui kolaborasi antara Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jombang dengan Pondok Pesantren Tebuireng dan Pengelola Makam Gus Dur, pengelolaan wisata religi Makam Gus Dur masih berlangsung secara sederhana dan belum tertata dengan baik. Arus peziarah yang terus meningkat setiap tahunnya sering menimbulkan kepadatan, keterbatasan lahan parkir, serta kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat istirahat, akses jalan menuju makam yang memadai, dan saran kebersihan. Aktivitas ekonomi masyarakat sekitar berjalan secara spontan tanpa regulasi yang jelas, sehingga menimbulkan potensi ketidakteraturan dan mengurangi kenyamanan peziarah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Lukman Hakim selaku Pengelola Pondok Pesantren Tebuireng berikut:

“Sejak awal Gus Dur dimakamkan disini sangat banyak yang berziarah, namun dari situ timbul permasalahan-permasalahan, salah satunya karena kurangnya fasilitas pendukung seperti akses jalan, parkir, dan tempat.”
(Hasil wawancara pada 18 September 2024)

Selain itu, sebelum adanya kolaborasi antara Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jombang dengan Pondok Pesantren Tebuireng dan Pengelola Makam Gus Dur, tidak terdapat pembagian peran serta tanggung jawab masing-masing secara jelas karena tidak adanya aturan sebagai pedoman. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wiwin selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Jombang sebagai berikut:

“Tidak ada mbak. Memang pembagian peran masing-masing pihak yang jelas ya setelah adanya kerjasama ini.” (Hasil wawancara pada 20 September 2025)

Dalam kolaborasi yang terjalin, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jombang berfungsi sebagai mediator dan fasilitator yang berupaya untuk membangun komunikasi, menengahi perbedaan kepentingan serta menjaga keseimbangan aspek religius dengan kebutuhan pariwisata. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim selaku Pengelola Pondok Pesantren Tebuireng sebagai berikut:

“Kita tentu tidak dapat berkerja sendiri, yang mempunyai wewenang untuk menjembatani permasalahan ini kan pihak pemerintah dan kita nurut saja.” (Hasil wawancara pada 18 September 2024)

Pada proses kolaboratif, berlangsung dengan adanya dialog tatap muka, musyawarah, dan koordinasi rutin antara Pemerintah Daerah dengan Pondok Pesantren Tebuireng dan Pengelola Makam Gus Dur. Melalui interaksi intensif ini, terbangun pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai religius sekaligus mengoptimalkan potensi wisata. Proses ini menghasilkan komitmen bersama yang diwujudkan dalam penyediaan fasilitas wisata, pengaturan arus peziarah, serta promosi destinasi berkelanjutan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkap oleh Bapak Lukman Hakim selaku Pengelola Pondok Pesantren Tebuireng sebagai berikut:

“Koordinasi antara kita dengan pihak Pemerintah diawali dengan permasalahan mengenai kenaikan jumlah peziarah namun tidak diimbangi oleh fasilitas yang mendukung mbak, jadi dari koordinasi itu yang menghasilkan koordinasi-koordinasi selanjutnya yang menghasilkan kolaborasi ini.” (Hasil wawancara pada 18 September 2024)

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghadirkan pola kerjasama yang lebih terarah, sehingga lahir inisiatif kolaborasi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jombang sebagai bentuk respon terhadap tantangan pengembangan wisata religi yang semakin kompleks.

Penelitian mengenai wisata religi di Indonesia telah banyak dilakukan, namun mayoritas masih berfokus pada aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun potensi destinasi. Misalnya, (Kartika, Diartho, & Prianto, 2020) menekankan bahwa pengembangan wisata religi Makam Gus Dur lebih banyak dikaji dengan pendekatan *Community Based Tourism* yang menyoroti partisipasi masyarakat, sehingga belum menyentuh aspek tata kelola kolaboratif antar pemangku kepentingan secara mendalam. Padahal, kompleksitas wisata religi melibatkan banyak aktor seperti pemerintah daerah, pengelola pesantren, pelaku usaha, dan masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda.

Disisi lain, penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata sebenarnya sudah mulai dilakukan, namun belum menysar secara khusus pada konteks wisata religi Makam Gus Dur. Misalnya, (Putri, Maharani, & Lailin, 2024) meneliti tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wisata religi di Kota Blitar dan (Rochmatin, Muchsin, & Sunariyanto, 2025) menyoroti praktik tata kelola kolaboratif di Desa Wisata Kertosari. Studi-studi tersebut menegaskan bahwa *collaborative governance* dapat menjadi kerangka efektif dalam menjembatani kepentingan beragam aktor, namun belum ada yang secara eksplisit mengaplikasikan kerangka ini pada pengembangan wisata religi Makam Gus Dur.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian bahwa meskipun wisata religi Makam Gus Dur telah banyak dikaji dari sisi ekonomi dan sosial, namun prespektif *collaborative governance* masih jarang digunakan. Padahal, teori yang dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2007) menawarkan kerangka analisis yang komprehensif melalui dimensi kondisi awal, design kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dengan menganalisis bagaimana tata kelola kolaboratif diterapkan dalam pengembangan wisata religi Makam Gus Dur.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pendekatan *collaborative governance*, pengembangan destinasi wilayah terpadu tentu mengharuskan adanya kolaborasi pandangan dari berbagai *stakeholder*. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Jombang masih terus berupaya untuk membangun Wisata Religi Makam Gus Dur melalui kolaborasi antar pemangku kebijakan, sehingga memerlukan kajian administrasi publik yang disebut *collabrative governance*. *Collaborative governance* didefinisikan oleh (Ansell & Gash, 2007) sebagai model administrasi publik yang secara efektif mengikutsertakan pihak non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat musyawarah dan konsensus untuk pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dan program publik (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020). Maka pengelolaan Wisata Religi Makam Gus Dur penting untuk diatur secara *collaborative governance* dengan mengikutsertakan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, agar pengelolaan sektor pariwisata diharapkan mampu menghasilkan keluaran yang memberikan dampak positif, maka pemerintah dan

non-pemerintah harus berkolaborasi dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata melalui *collaborative governance* (Pramesti, Salistio, & Atika, 2022).

Dalam pengembangan Wisata Religi Makam Gus Dur, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jombang berperan sebagai pihak pemerintah, sedangkan Yayasan Pondok Pesantren Tebuireng berperan sebagai pihak swasta. Bentuk pengembangan dari hasil kolaborasi yang terjadi diantaranya promosi wisata yang dilaksanakan oleh DISPORAPAR Kabupaten Jombang sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata religi Makam Gus Dur. Kemudian DISPORAPAR Kabupaten Jombang juga memfasilitasi koordinasi dengan lintas sektor guna pengembangan Makam Gus Dur, dimana hasil koordinasi ini salah satunya ialah pelimpahan lahan yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur ke DISPORAPAR Kabupaten Jombang untuk pembangunan fasilitas parkir dan stand pedagang. Selain itu, DISPORAPAR Kabupaten Jombang juga menyediakan sarana penunjang pengembangan Makam Gus Dur dengan menyediakan peminjaman serta pengandaan koleksi dan sejumlah saran informasi mengenai perkembangan islam yang berada di Museum Islam KH. Hasyim Asy'ari yang dapat menambah wawasan wisatawan. Kemudian, DISPORAPAR Kabupaten Jombang juga memberikan bimbingan serta pelatihan bagi pengelola Makam Gus Dur.

Tentunya dalam kerjasama yang dilaksanakan oleh DISPORAPAR Kabupaten Jombang dengan Pondok Pesantren Tebuireng untuk pengembangan wisata religi Makam Gus Dur, akan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang bekerjasama. Keuntungan yang didapatkan oleh pihak DISPORAPAR Kabupaten

Jombang berupa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, sehingga secara tidak langsung Kabupaten Jombang akan lebih dikenal banyak orang dan meningkatkan laju perekonomian. Sementara itu, keuntungan yang di dapatkan oleh Pondok Pesantren Tebuireng adalah dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Makam Gus Dur dan dengan hal tersebut dapat melestarikan Makam Gus Dur. Kemudian keuntungan yang di dapatkan oleh UMKM yang berada di sekitar Makam Gus Dur ialah menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup UMKM tersebut.

Oleh sebab itu, untuk menganalisis seberapa jauh sinergi antara aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan wisata religi Makam Gus Dur terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, diperlukan kajian mendalam menggunakan pendekatan *collaborative governance* sebagai mana yang diuraikan oleh (Ansell & Gash, 2007), yang mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, design kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif.

Alasan pemilihan teori *collaborative governance* dari (Ansell & Gash, 2007) dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian konsepnya dengan realitas pengembangan wisata religi Makam Gus Dur di Kabupaten Jombang. Dimensi kondisi awal yang ditawarkan (Ansell & Gash, 2007) menjadi sangat relevan, karena dalam praktik di lapangan terdapat beragam aktor dengan latar belakang, kepentingan, dan kapasitas yang berbeda. Misalnya, pemerintah daerah memiliki kepentingan pada peningkatan PAD dan tata kelola pariwisata, sementara Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Tebuireng dan Pengelola Makam Gus Dur lebih menekankan aspek spiritual, tradisi, dan nilai-nilai budaya. Di sisi lain, masyarakat

lokal melihat pengembangan wisata sebagai peluang ekonomi, meskipun sering kali terdapat ketimpangan dalam akses sumber daya dan manfaat yang diterima. Kondisi awal yang ditandai dengan adanya riwayat kerjasama sekaligus potensi konflik antar aktor ini, sesuai dengan penekanan (Ansell & Gash, 2007) bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh latar belakang sebelum kerjasama, keseimbangan kekuasaan, serta insentif partisipasi yang ada sejak awal. Dengan demikian, teori ini dipilih karena dapat membantu penulis untuk menjelaskan bagaimana dinamika kondisi awal di Makam Gus Dur mempengaruhi proses pembentukan kolaborasi antar aktor dalam pengembangan wisata religi tersebut.

Merujuk pada uraian diatas, hal tersebut menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan studi yang mendalam dan terarah mengenai pengembangan wisata religi Makam Gus Dur. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Religi Makam Gus Dur di Kabupaten Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan utama yang diangkat dalam kajian ini adalah bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengembangan Wisata Religi Makam Gus Dur di Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai penerapan proses *collaborative governance* dalam pengembangan Wisata Religi Makam Gus Dur Di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan sejumlah kontribusi, antara lain:

1. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat berperan sebagai sarana pendukung dalam kegiatan akademik, menjadi referensi bagi penelitian serupa dimasa mendatang, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan bidang terkait.

2. Bagi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Jombang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam menyediakan solusi dalam perumusan kebijakan, khususnya dalam upaya pengembangan wisata religi Makam Gus Dur.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mahasiswa mengenai konsep collaborative governance dalam konteks pengelolaan objek wisata, serta menjadi media aplikatif bagi teori-teori yang diperoleh selama proses perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik.